

Laporan APBD Triwulan IV

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Evidence	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Catatan Verifikator
8.01.0.00.0.00.01.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					92,33	ST		31.382.474.291,00	28.116.912.173,00	89,69	T			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan. Bakesbangpol	%	100,00	100,00	100	ST		15.379.675.774,00	13.726.950.112,00	89,34	T			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	5,00	100	ST		241.280.000,00	236.527.200,00	98,04	ST	1. Kurangnya waktu untuk melakukan perencanaan, karena adanya aktivitas lain yang harus diselesaikan sehingga tidak fokus dalam merencanakan. 2. Kurangnya sumberdaya yang memadai. 3. Kurangnya komunikasi antar tim perencanaan.	1. Pentingnya untuk mengatur waktu dengan baik sesuai jadwal perencanaan. 2. Menggunakan sumberdaya yang efektif 3. Meningkatkan komunikasi antara tim perencanaan, baik dalam internal perangkat daerah maupun antar instansi terkait	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	7,00	100	ST		161.735.000,00	158.468.496,00	97,99	ST			
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	ST		48.127.000,00	47.155.210,00	97,98	ST			
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	4,00	100	ST		31.418.000,00	30.903.494,00	98,36	ST			
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	ST		10.780.468.927,00	9.350.606.092,00	86,74	T	1. Keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM dalam pengelolaan keuangan 2. Koordinasi antar instansi terkait kurang optimal 3. Kelengkapan administrasi dari masing-masing bidang terlambat disampaikan 4. Sistem Aplikasi keuangan / Internet sering mengalami gangguan	1. Regulasi dan adanya SOP administrasi keuangan yg jelas 2. Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap tertib administrasi 3. Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	38,00	38,00	100	ST		10.490.979.456,00	9.059.232.884,00	86,37	T			
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		196.299.471,00	185.853.600,00	99,96	ST			
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2,00	2,00	100	ST		93.190.000,00	92.903.780,00	99,69	ST			
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		35.781.720,00	35.696.000,00	99,76	ST	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Kurangnya Pemahaman Regulasi, 3. Kurangnya pelatihan/sertifikasi pengelola barang, administrasi 4. Dokumentasi Tidak Tertib, 5. Sistem Informasi yang belum optimal	1. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan dan pengawasan aset. 2. SDM pengelola barang yang kompeten dan terlatih, 3. Pemanfaatan sistem informasi aset (SIMDA/SIPD BMD), 4. Koordinasi dan kerja sama yang baik antar unit kerja, 5. Pengawasan internal yang efektif, 6. Kesadaran dan tanggung jawab pengguna barang	
8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	ST		35.781.720,00	35.696.000,00	99,76	ST			
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	ST		174.833.800,00	173.298.500,00	99,46	ST	1. Keterbatasan SDM kepegawaian (jumlah dan kompetensi), 2. Pemahaman regulasi kepegawaian yang kurang, 3. Sistem informasi kepegawaian belum optimal, 4. Koordinasi antar unit kerja lemah, 5. Pengawasan dan pengendalian yang kurang efektif	1. SDM Kepegawaian yang kompeten, 2. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian, 3. Komitmen pimpinan dalam pembinaan kepegawaian, 4. Pengawasan dan evaluasi yang efektif	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1,00	1,00	100	ST		174.833.800,00	173.298.500,00	99,46	ST			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Evidence	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Catatan Verifikator
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	3,00	3,00	100	ST		801.100.093,00	767.682.200,00	95,91	ST	Pengawasan administrasi kurang optimal,Pengawasan administrasi kurang optimal,Keterbatasan SDM administrasi dan kompetensinya,Beban kerja tinggi dan rangkap tugas	Regulasi dan SOP yang jelas,Sarana dan prasarana yang memadai,SDM administrasi yang kompeten,Komitmen dan dukungan pimpinan,Koordinasi dan komunikasi yang baik,Pengawasan dan evaluasi yang efektif	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	ST		140.000.000,00	139.037.000,00	99,31	ST			
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST		36.088.000,00	36.071.000,00	99,95	ST			
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	ST		186.000.000,00	154.281.000,00	82,95	T			
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15,00	15,00	100	ST		296.230.000,00	295.520.200,00	99,99	ST			
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	ST		142.782.093,00	142.773.000,00	99,99	ST			
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		866.342.846,00	857.823.500,00	99,02	ST	Keterlambatan pelaksanaan pengadaan,Proses dan regulasi pengadaan yang kompleks,Koordinasi antar unit kerja kurang optimal,Perencanaan kebutuhan barang kurang tepat,Permasalahan penyedia barang/jasa,Keterbatasan anggaran pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik (LPSE),Regulasi dan SOP pengadaan yang jelas,SDM pengadaan yang kompeten dan bersertifikat,Perencanaan kebutuhan yang tepat dan matang,Dukungan anggaran yang memadai,Koordinasi dan komitmen antar unit kerja	
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2,00	2,00	100	ST		391.200.000,00	389.610.000,00	99,59	ST			
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	57,00	57,00	100	ST		370.520.050,00	363.941.500,00	98,22	ST			
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16,00	16,00	100	ST		104.622.796,00	104.272.000,00	99,66	ST			
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	ST		878.212.808,00	756.953.915,00	86,19	T	Perencanaan kebutuhan jasa kurang tepat,SDM pengelola pengadaan belum kompeten,Koordinasi antar unit kerja kurang optimal,Proses pengadaan jasa yang kompleks,Keterbatasan anggaran jasa penunjang	Regulasi dan SOP pengadaan jasa jelas,Dukungan anggaran memadai,Perencanaan kebutuhan jasa yang matang,Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik (LPSE),SDM pengelola kompeten dan terlatih	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100	ST		259.120.000,00	150.737.167,00	58,17	R			
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100	ST		619.092.808,00	606.216.748,00	97,92	ST			
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	ST		1.601.655.580,00	1.560.978.543,00	97,46	ST	Kurangnya pengawasan dan monitoring pemeliharaan,Data inventaris dan kondisi barang tidak lengkap atau tidak mutakhir,Keterbatasan anggaran pemeliharaan,SDM pemeliharaan kurang kompeten atau terbatas,Kurangnya perencanaan dan jadwal pemeliharaan rutin	SDM pemeliharaan yang kompeten dan terlatih,Sistem dokumentasi dan inventaris barang lengkap,Koordinasi dan komunikasi antar unit kerja efektif,Pengawasan dan monitoring rutin terhadap kondisi barang,Perencanaan dan jadwal pemeliharaan yang baik,Dukungan anggaran yang memadai	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	33,00	33,00	100	ST		511.430.000,00	473.816.811,00	92,65	ST			
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	47,00	47,00	100	ST		133.790.000,00	131.570.000,00	98,34	ST			
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	100	ST		956.435.580,00	955.591.732,00	99,91	ST			
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK dan PPWK)	%	74,28	74,28	100	ST		4.991.129.000,00	4.954.381.870,00	99,26	ST			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Evidence	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Catatan Verifikator
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		4.991.129.000,00	4.954.381.870,00	99,26	ST	1. Kurangnya Penerapan Pengetahuan Pendidikan tentang Ideologi Pancasila. 2. Kurangnya Fasilitas Teknologi / Digitalisasi di beberapa Kecamatan 3. Belum optimalnya sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Wawasan Kebangsaan	1. Perlu adanya peran pemerintah daerah dan sekolah dalam upaya mendukung program kegiatan Pembinaan Karakter ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan. 2. Tersedianya Wifi dan jaringan internet yang baik dalam mendukung dan memadai terutama di Sekolah - sekolah khususnya daerah pedalaman. 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung program kegiatan Pembinaan Karakter Ideologi Pancasila dan Penguatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan.	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100	ST			
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	12,00	12,00	100	ST		134.325.800,00	134.194.000,00	99,9	ST			
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	300,00	300,00	100	ST		3.480.588.200,00	3.444.187.870,00	98,95	ST			
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	40,00	40,00	100	ST		176.215.000,00	176.000.000,00	99,88	ST			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik di Wilayah Kutai Timur	%	60,00	60,00	100	ST		3.386.032.120,00	2.810.725.963,00	83,47	T			
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	11,00	11,00	100	ST		3.386.032.120,00	2.810.725.963,00	83,47	T	1. Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan tidak hanya pada tahun politik. 2. Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak terlaksana Bimtek bagi Bendahara Partai Politik dan Monev pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 oleh Tim Kajian	Antusias partisipasi Kaum Perempuan dan Pemilih Pemula dalam mengikuti Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik sehingga capaian kinerja meningkat	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		38.221.330,00	36.875.000,00	96,48	ST			
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	11,00	11,00	100	ST		2.060.103.990,00	2.027.998.853,00	99,2	ST			
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100,00	200,00	200	ST		109.574.000,00	108.130.000,00	98,68	ST			
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100,00	100,00	100	ST		82.450.600,00	80.262.549,00	97,35	ST			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Evidence	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Catatan Verifikator
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	ST		1.095.682.200,00	557.459.561,00	50,88	SR			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	LSM/Organisasi yang Aktif	LSM	280,00	252,00	90	T		2.266.653.000,00	1.927.232.078,00	85,03	T			
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		2.266.653.000,00	1.927.232.078,00	85,03	T	1. Perubahan kebijakan dan regulasi yang relatif cepat menuntut penyesuaian berkelanjutan, sehingga memerlukan waktu tambahan dalam proses perumusan dan pemantapan kebijakan teknis. 2. Masih terdapat organisasi kemasyarakatan yang belum tertib administrasi dan kurang aktif dalam mengikuti pembinaan, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan pemberdayaan secara menyeluruh.	1. Adanya regulasi dan pedoman teknis dari pemerintah pusat dan daerah yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur. 2. Adanya kesadaran dan partisipasi aktif sebagian organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.	
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		63.345.000,00	63.336.000,00	99,99	ST			
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	11,00	8,00	72,73	S		1.751.236.000,00	1.446.497.000,00	82,6	T			
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	400,00	250,00	62,5	R		297.470.000,00	280.696.303,00	94,36	ST			
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50,00	44,00	88	T		92.509.000,00	75.831.275,00	81,97	T			
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	ST		62.093.000,00	60.871.500,00	98,03	ST			
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan Urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	%	100,00	100,00	100	ST		1.139.656.000,00	1.131.541.680,00	99,29	ST			
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		1.139.656.000,00	1.131.541.680,00	99,29	ST	Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produk hasil UMKM sehingga mengakibatkan keteringgalan pelaku usaha lain.	Regulasi dan payung hukum yang jelas serta dukungan pemerintah Daerah dalam rangka Pemberantasan peredaran Narkoba dan peningkatan pelaku usaha UMKM	
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		500.000.000,00	500.000.000,00	100	ST			
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	900,00	900,00	100	ST		476.427.000,00	470.899.880,00	98,84	ST			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Evidence	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Catatan Verifikator
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50,00	18,00	36	SR		102.379.000,00	102.301.800,00	99,92	ST			
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	ST		60.850.000,00	58.340.000,00	95,88	ST			
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sara	Kasus	0,00	0,00	0	SR		4.219.328.397,00	3.566.080.460,00	84,52	T			
		Cakupan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kutai Timur	%	100,00	100,00	100	ST								
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		4.219.328.397,00	3.566.080.460,00	84,52	T	Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan potensi ATHG di lingkungan sekitarnya, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Terbatasnya sarana prasarana penunjang dan wilayah geografis yang luas.	Regulasi dan Payung Hukum yang Jelas, Dukungan Pemerintah Daerah	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	ST			
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150,00	55,00	36,67	SR		62.985.630,00	62.749.000,00	99,62	ST			
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	30,00	30,00	100	ST		249.326.880,00	247.042.330,00	99,09	ST			
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	2,00	2,00	100	ST		418.244.060,00	365.454.234,00	87,38	T			
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	1,00	100	ST		2.488.771.827,00	1.890.834.896,00	75,97	S			



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten

Tejo Yudianto, S.Pd
NIP.197309162000121002